

Implikasi Etika Lingkungan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Tabalong)

Annisa Mahfuzah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. E-mail: mahfuzah83@gmail.com

Maimunah

Konsentrasi Geofisika, Program Studi Fisika, Universitas Lambung Mangkurat. E-mail: Mahfuzah83@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

*Etika Lingkungan;
Kesejahteraan Ekonomi;
Masyarakat*

Cara Sitasi:

Mahfuzah, Annisa dan Maimunah. "Implikasi Etika Lingkungan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Tabalong)." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 2 (2019): 127-141.

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the implications of environmental ethics on the economic welfare of the community after the operation of a mining company in Tabalong Regency. In this study the authors used a descriptive analysis method using primary data and secondary information. The results showed that the environmental ethics of the people of Tabalong Regency had negative implications on the economic welfare of the community. The reason is the tendency of people who have anthropocentrism perspective on the environment. The perspective of anthropocentrism widens economic inequality in the people of Tabalong Regency. This is because welfare is only centered on certain people. This gap shows that the goal of economic activities for the mashlaba is not achieved, and the expectation of long-term contribution projections, namely trickle-down effects and multiplier effects on the economy also does not occur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui implikasi etika lingkungan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat setelah beroperasinya perusahaan tambang di Kabupaten Tabalong. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan data primer dan informasi sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika lingkungan masyarakat Kabupaten Tabalong berimplikasi negatif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penyebabnya adalah kecenderungan masyarakat yang mempunyai cara pandang antroposentrisme terhadap lingkungan. Cara pandang antroposentrisme memperlebar kesenjangan ekonomi di masyarakat Kabupaten Tabalong. Hal ini dikarenakan kesejahteraan itu hanya berpusat pada orang tertentu saja. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tujuan kegiatan perekonomian untuk ke-*mashlabat*-an tidak tercapai, serta harapan akan proyeksi kontribusi jangka panjang, yaitu *trickle-down effect* (tetesan ke bawah) dan *multiplier-effect* (efek berganda) terhadap perekonomian juga tidak terjadi.

1. Pendahuluan

Kesejahteraan menjadi bagian penting bagi suatu negara. Suatu negara didirikan dan dibentuk dengan tujuan agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.¹ Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam. Kekayaan alam tersebut tersebar diberbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Tabalong, dimana kekayaan alam tersebut dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena hakikatnya barang tambang tersebut untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 33 Undang-undang 1945.

Seperti yang kita ketahui, kegiatan penambangan selalu bersinggungan dengan lingkungan hidup, ada sisi positif dan negatif dari kegiatan tersebut. Hadirnya industri pertambangan memberikan harapan baru bagi pemerintah. Perekonomian daerah diharapkan bisa meningkat dengan tersedianya lapangan pekerjaan di sektor pertambangan, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dengan menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan di masyarakat, serta dapat menekan angka kemiskinan. Di samping itu juga, harapan akan proyeksi kontribusi jangka panjang, yaitu *trickle-down effect* (tetesan ke bawah) dan *multiplier-effect* (efek berganda) terhadap perekonomian lokal, regional, dan nasional. Sehingga, manfaat dengan adanya aktivitas pertambangan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Di sisi lain, karena kegiatan ini bersinggungan langsung dengan lingkungan, sehingga aktivitas pertambangan juga terindikasi menimbulkan permasalahan lingkungan. Terutama lingkungan yang dekat dengan area pertambangan seperti terkikisnya wilayah tersebut, sehingga dapat menyebabkan erosi. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Tabalong, permasalahan lingkungan yang terjadi berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat mengurangi kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan yang menurun dapat menjadi ancaman terhadap kesehatan warga, berubahnya landscape alam sehingga menurunnya nilai estetika, terganggunya ekosistem, dan mengakibatkan kerugian ekonomi.

Keserakahan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup telah mendorongnya untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Dengan alasan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan laju peningkatan produksi, maka pembangunan dipacu secepat mungkin meski memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis terkait aktivitas pertambangan dengan memperhatikan konsep etika lingkungan sebagai instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

2. Etika Lingkungan

Sonny Keraf menjelaskan bahwa etika lingkungan membahas manusia sebagai individu dan sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas dalam totalitasnya, dan juga hubungan antara manusia yang satu dan lainnya yang berdampak langsung atau tidak langsung pada lingkungan hidup secara keseluruhan.² Dengan tujuan agar mengubah

¹ Almizan Almizan, "Distribusi Pendapatan : Kesejahteraan menurut Konsep Ekonomi Islam," *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 1 (June 1, 2016): 61, <https://doi.org/10.15548/maqdis.v1i1.16>.

² A. Sonny Keraf, *Etika lingkungan hidup* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 40.

pemahaman dan perilaku manusia terhadap lingkungan, konsep etika lingkungan hadir sebagai respon atas krisisnya etika moral manusia tersebut.

Dalam etika lingkungan dikenal teori *Shallow Environmental Ethics* (antroposentris), *Intermediate Environmental Ethics* (biosentris), dan *Deep Environmental Ethics* (ekosentris). Ketiga teori ini memiliki sudut pandang berbeda tentang manusia, alam serta hubungan manusia dan alam.³

Manning, Valliere, dan Minter menjelaskan bahwa manusia tidak hanya berpusat pada dirinya sendiri (*antroposentris*), tetapi juga perlu memperhatikan kehidupan makhluk hidup lain di sekitarnya sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan (*biocentric*) serta perlu memperhatikan akan keberlangsungan hubungan antara manusia dan alam (*ecocentric*). Dalam filsafat politik ekologi, istilah ekosentrisme menunjukkan sifat-berpusat, kebalikannya dari manusia-terpusat, sistem nilai.

Apabila manusia menjadikan dirinya sebagai fokus utama yaitu hanya memperhatikan kepentingannya sendiri dengan mengabaikan alam dan lingkungan, maka tidak akan terwujud konsep keberlanjutan. Makhluk hidup lain disekitarnya juga harus dipandang memiliki kepentingannya sendiri yang sama-sama memiliki hak untuk hidup. Artinya, dalam konsep *biocentric*, antara manusia dan alam memiliki hak yang sama. Sedangkan dalam konsep *ecocentric*, posisi manusia tidak hanya untuk menjaga kesamaan hak terhadap alam, akan tetapi juga menjaga keselarasan kepentingan antara dirinya dengan alam.⁴

Dalam kajian kontemporer, aturan etika terhadap lingkungan dibahas dalam konsep fikih lingkungan. Istilah fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang memuat tentang perilaku-perilaku ekologis manusia yang terperinci agar tujuan utamanya tercapai, yaitu tujuan untuk kemashlahatan kehidupan dengan nuansa ekologis.⁵ Sehingga etika lingkungan dalam perkembangannya menuntut perluasan cara pandang agar krisis lingkungan dapat diminimalisir dengan memperhatikan dan menggunakan prinsip etika lingkungan sebagai perwujudan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup agar tetap berkualitas.

3. Signifikansi Etika Lingkungan bagi Masyarakat

Menurut teori DE dalam buku A. Sonny Keraf, menghargai benda-benda nonhayati bagi manusia merupakan sebuah keharusan, tuntutan ini karena adanya persamaan hak antara manusia itu sendiri dengan alam yakni hak yang sama untuk berada, hidup, dan berkembang. Pada dasarnya bukan hanya manusia yang bergantung terhadap alam tetapi dalam komunitas ekologis manusia merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari alam tersebut.⁶

³ Kaelany HD, *Islam, Kependudukan dan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

⁴Ph Bourdeau, "The Man-nature Relationship and Environmental Ethics," *Journal of Environmental Radioactivity* 72, no. 1-2 (January 2004): 9-15, [https://doi.org/10.1016/S0265-931X\(03\)00180-2](https://doi.org/10.1016/S0265-931X(03)00180-2).

⁵Sukarni Sukarni, "Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015): 436, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i2.731>.

⁶ Eko Ariwidodo, "Relevansi Pengetahuan Masyarakat Tentang Lingkungan Dan Etika Lingkungan Dengan Partisipasinya Dalam Pelestarian Lingkungan," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 11, no. 1 (2014): 1-20.

Pentingnya etika dalam konsep ekologi tergambar pula dalam etika lingkungan Islam yang dimaknai sebagai etika religius yang menggambarkan perilaku-perilaku antara yang boleh dilakukan ataupun tidak boleh dalam hubungan manusia dengan lingkungannya.⁷ Etika lingkungan disini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang perilaku masyarakat terhadap lingkungan, yang di dalamnya berbicara tentang baik-buruknya perilaku masyarakat tersebut yang sesuai atau tidaknya dengan aturan atau norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi suatu perilaku kebiasaan, kaidah atau norma terhadap lingkungan. Etika religius menuntut manusia sebagai subjek pelaku moral agar mendukung dan turut menjaga kelestarian lingkungannya, dalam upaya menjaga sumber daya alam yang notabene adalah penopang hidup mereka.⁸

Kegiatan penambangan dilakukan pada wilayah yang memiliki ketersediaan sumber daya alam. Adanya aktivitas tambang dapat mempengaruhi komponen dalam lingkungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Komponen yang dipengaruhi diantaranya kimia, fisik, biologi, dan sosial yaitu respon manusia terhadap lingkungan pertambangan itu sendiri.

Hubungan antara manusia dengan lingkungan geologis dikenal sebagai geologi lingkungan. Geologi lingkungan diartikan sebagai pengelolaan terhadap sumber daya alam yang bertujuan agar sumber daya alam yang tersedia mampu mendukung dalam proses pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan serta upaya minimalisasi dampak dari eksploitasi tambang. Dalam kehidupan manusia, lingkungan geologis yang memiliki potensi tambang tidak hanya memberikan manfaat seperti ketersediaan air bersih, mineral ekonomis, bahan bangunan, bahan bakar, dan lainnya, namun juga memiliki potensi terjadinya bencana ketika tidak dikelola dengan baik.⁹

Memelihara lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang universal. Karena, Islam tidak menitik-beratkan kepada aspek materi saja dalam upaya yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh masyarakat. Sehingga, aktivitas yang dilakukan di dalam roda ekonomi memiliki aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan.¹⁰ Konsep keadilan universal Islam adalah meletakkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dari aktivitas kemanusiaan. Peduli terhadap kelestarian lingkungan tidak saja berorientasi pada ke-*maslahat*-an lingkungan itu sendiri, akan tetapi lebih dari itu sebagai jaminan terhadap kelangsungan hidup manusia. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengelola alam, tetapi kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggungjawab dan berkeadilan.¹¹

⁷ Sukarni Sukarni, "Isu Lingkungan dalam Perspektif Kalam, Fiqh, dan Tasawuf," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (March 4, 2013): 445–67, <https://doi.org/10.15642/islamica.2013.7.2.445-467>.

⁸ Rabiah Z. Harahap, "Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup," *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 01 (2015).

⁹ author Tiyas Nurcahyani, "Kajian Pemanfaatan Lubang Bekas Tambang (Void) Di PT. Adaro Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan = Study of Utilization of Ex-Mine Hole (Void) at PT. Adaro Indonesia, South Kalimantan Province," Universitas Indonesia Library, 2011, <http://lib.ui.ac.id>.

¹⁰ Sofi Mubarak, "Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan," *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 3, no. 1 (March 5, 2018): 143, <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v3i1.1872>.

¹¹ Abrar Abrar, "Islam dan Lingkungan," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1, no. 1 (April 10, 2015): 24, <https://doi.org/10.22202/mamangan.89>.

Semua benda dan bagian di alam semesta ini diciptakan berdasarkan tujuannya masing-masing terlepas tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari alam semesta, setiap orang mempunyai peran dalam upaya pelestarian lingkungan karena tanggung jawab tersebut bukan individual tetapi sebagai tanggung jawab bersama (kolektif).

4. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

4.1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang bermakna aman, sentosa, makmur, dan selamat, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.¹² Kata sejahtera berasal dari bahasa sansekerta *catara* (payung). Dalam konteks kesejahteraan, *catara* merupakan orang yang sejahtera, yaitu orang yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik secara lahir maupun batin.¹³ Sedangkan berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, kesejahteraan diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

4.2. Kesejahteraan Ekonomi Konvensional

Penerapan prinsip ekonomi dalam perekonomian menjadikan setiap individu menilai agar setiap kegiatan ekonomi yang dilakukannya menghasilkan keuntungan yang maksimal. Akibatnya, kegiatan ekonomi tersebut sulit untuk mencapai perekonomian yang benar-benar mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan ekonomi konvensional sering dinilai pada aspek material, dengan mengabaikan spiritual dan moral. Mekanisme pasar yang berjalan di masyarakat menggambarkan keadaan pasar yang kompetitif dalam tujuan utamanya yaitu mencari keuntungan semata. Moral seperti ini menjadi penghambat untuk mencapai kesejahteraan.

Kesejahteraan pendekatan modern yang merupakan perkembangan dari neo klasik mengasumsikan bahwa kesejahteraan tidak bisa dinilai hanya dengan melihat dari aspek materi saja, namun aspek nonmateri juga perlu dipertimbangkan dalam menilai sebuah kesejahteraan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena kesejahteraan itu dinilai oleh berbagai keadaan, diantaranya kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, serta hubungan sosial individu dengan lingkungannya.

4.3. Kesejahteraan Ekonomi dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, kesejahteraan biasa disebut dengan *falab*. *Falab* berasal dari bahasa Arab dengan kata kerja *aflaba-yufihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.¹⁴ Dari pengertian tersebut *falab* bisa diartikan

¹² “Arti Kata Sejahtera - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed December 8, 2019, <https://kbbi.web.id/sejahtera>.

¹³ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung, Indonesia: PT Refika Aditama, 2012), 8.

¹⁴ Universitas Islam Indonesia (UII), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), and Bank Indonesia (BI) (Jakarta), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers (Rajagrafindo Persada), 2008), 2.

sebagai suatu kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan, dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat baik secara lahir maupun batin. Sehingga seseorang mampu mengukur tingkat kebahagiaan maupun kesejahteraan karena hal tersebut bersifat keyakinan yang ada dalam setiap individu. Kesejahteraan (*falah*) dapat terwujud apabila manusia mampu memenuhi kebutuhan yang seimbang artinya manusia tersebut mampu memenuhi kebutuhan di dunia maupun di akhirat. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan tersebut akan memberikan *maslahah* bagi diri manusia itu sendiri.

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya yaitu terpenuhinya kebutuhan ruhani dan materi. Beliau menjabarkan bahwa sumber kesejahteraan untuk mewujudkan tujuan syara' dapat dilakukan dengan menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-maal*).¹⁵ Al-Ghazali mendefinisikan fungsi kesejahteraan dari aspek ekonomi meliputi kebutuhan pokok, kesenangan dan kenyamanan serta kemewahan.

Beberapa faktor pendorong untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat yang sejahtera dalam konteks Islam adalah memenuhi kebutuhan (*need*) dan bukan memenuhi kepuasan (*want*) saja. Kesejahteraan dalam ekonomi Islam dimaksudkan agar kesejahteraan tersebut mencakup keseluruhan unsur yang meliputi materi dan non materi.¹⁶ Pada dasarnya, kegiatan ekonomi Islam bukan untuk memenuhi keinginan saja melainkan mencapai keselamatan dunia maupun akhirat.

Kesejahteraan ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Konsep ini bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial serta nilai politik Islam.

4.4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang memperlihatkan keadaan kehidupan masyarakat berdasarkan standar dari kehidupan mereka.¹⁷ Standar kehidupan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS). Kemajuan pembangunan sering dilihat dari indikator ekonomi, seperti: pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan. Namun, penilaian berdasarkan indikator ini belum menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Karena indikator ekonomi tersebut diukur secara obyektif dengan pendekatan berbasis uang (*monetary-based indicators*).¹⁸

Pengembangan pengukuran tingkat kesejahteraan dari segi fisik dapat dilihat dari *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia), *Physical Quality Life Index* (Indeks Mutu Hidup), *Basic Needs* (Kebutuhan Dasar), dan *GNP/Kapita* (Pendapatan Perkapita). Ukuran kesejahteraan ekonomi ini terbagi atas konsumsi dan produksi (skala usaha). Jika dilihat dari sisi konsumsi, untuk mengukur kesejahteraan dilakukan dengan menghitung besarnya

¹⁵ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya' Ulum Al-Din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 13.

¹⁶ Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014): 21–42.

¹⁷ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah* (UPP STIM YKPN, 2012), 145.

¹⁸ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 380–405.

pengeluaran seseorang atau keluarga untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya dalam periode tertentu.¹⁹ Sedangkan jika berdasarkan skala usaha berdasarkan kontribusi masing-masing subsektor lapangan usaha.

Tingkat kesejahteraan yang tinggi bisa dicapai dengan berupaya memaksimalkan tingkat kepuasan atas sumber daya yang dimiliki. Sebagian masyarakat mengaitkan kesejahteraan dengan konsep kualitas hidup. Kualitas hidup merupakan sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam hubungannya dengan budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya. Sehingga kesejahteraan masyarakat itu tidak hanya berhubungan dengan beberapa faktor non ekonomi saja tetapi juga pada faktor sosial dan juga politik.

5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menganalisis serta menginterpretasikannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui implikasi etika lingkungan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Tabalong setelah beroperasinya perusahaan tambang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer didukung pula dengan data sekunder. Data primer diperoleh penulis dengan melakukan observasi di lapangan dan dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak yang dapat memberikan informasi mendalam mengenai penelitian ini. Adapun masyarakat yang menjadi narasumber dalam penelitian ini merupakan masyarakat asli dan masyarakat pendatang yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan sumber pustaka yang dapat digunakan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya adalah data publikasi BPS Kabupaten Tabalong. Data yang diperoleh di lapangan kemudian direduksi dengan melakukan abstraksi dan klasifikasi data sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan, selanjutnya membandingkan dengan teori yang ada dan melakukan penarikan kesimpulan.

6. Temuan dan Analisis

6.1. Analisis Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat berdasarkan Indikator BPS

Perusahaan tambang tetap eksis sampai sekarang. Eksistensinya perusahaan tersebut banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Berikut adalah gambaran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong.²⁰

¹⁹ Meri Enita Puspita Sari and Diah Ayu Pratiwi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam," *Jurnal Trias Politika* 2, no. 2 (2018).

²⁰ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong," accessed December 9, 2019, <https://tabalongkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/826/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-tabalong-2002-2018.html>.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Tabalong (Persen)

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Tabalong	6.03	5.30	7.23	5.33	4.36	4.03	2.41	3.14	3.76	3.78



Gambar di atas menunjukkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong.²¹ Pertumbuhan ini terdiri dari struktur ekonomi pembentuknya. Berdasarkan data BPS, ada tiga sektor unggulan yang membentuk struktur ekonomi Kabupaten Tabalong. Ketiga sektor tersebut yaitu sektor Pertambangan dan penggalian, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta sektor Industri Pengolahan.²² Di tahun 2018 distribusi terhadap PDRB Kabupaten Tabalong dari sektor Pertambangan dan penggalian tercatat 44,22%, sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,07%, dan distribusi dari sektor Industri Pengolahan sebesar 8,92%.

Berdasarkan data perekonomian Kabupaten Tabalong menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang masih fluktuatif. Ini berarti hadirnya perusahaan tambang tidak selalu menjadikan perekonomian meningkat secara PDRB, akan tetapi berdasarkan data BPS kontribusi sektor usaha terhadap PDRB Kabupaten Tabalong diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Tabalong ditopang oleh kegiatan di sektor Pertambangan dan Penggalian. Seperti yang terlihat di tahun 2014-2017, tercatat bahwa sektor pertambangan dan penggalian adalah lapangan usaha yang paling besar memberikan kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh data berikut.²³

²¹ “Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong,” accessed December 12, 2019, <https://tabalongkab.bps.go.id/>.

²²“PDRB Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong,” accessed December 9, 2019, <https://tabalongkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/821/distribusi-pdrb-kabupaten-tabalong-menurut-lapangan-usaha-2014-2018.html>.

²³ “Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha,” accessed December 21, 2019, <https://tabalongkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/821/distribusi-pdrb-kabupaten-tabalong-menurut-lapangan-usaha-2014-2018.html>.

Tabel 2. Distribusi PDRB Kabupaten Tabalong (Lapangan Usaha)

Kategori 2010	Distribusi PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture	10.40	10.86	11.03	10.97	11.07
B. Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	56.90	51.48	48.33	46.36	44.22
c. Industri Pengolahan / Manufacturing Industries	6.61	7.86	8.25	8.88	8.92
D. Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity & Gas	0.02	0.04	0.04	0.05	0.05
E. Pengadaan Air/Water supply	0.23	0.25	0.27	0.27	0.29
F. Konstruksi/Construction	4.20	4.98	5.51	5.80	6.14
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi/Trade and Reparation	5.75	6.57	7.26	7.81	8.40
H. Transportasi dan pergudangan/Transportation and Storing	1.67	1.85	2.01	2.09	2.20
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Acommodation	1.12	1.27	1.39	1.47	1.58
J. Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	3.19	3.51	3.80	4.01	4.35
K. Jasa Keuangan/Monetary Service	1.42	1.60	1.78	1.86	1.95
L. Real Estate/Real Estate	0.96	1.07	1.15	1.18	1.25
M,N. Jasa Perusahaan/Establishment Service	0.23	0.26	0.28	0.29	0.31
O. Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial/Government and Social Administration	3.48	4.06	4.15	4.05	4.11
P. Jasa Pendidikan/Education	2.79	3.14	3.44	3.51	3.67
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Health and Social Service	0.52	0.62	0.68	0.70	0.73
R,S,T,U. Jasa lainnya/Other Services	0.50	0.59	0.64	0.69	0.75
PDRB	100	100	100	100	100

6.2. Analisis Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat berdasarkan sudut pandang Islam

Isu lingkungan sejauh ini masih ditanggapi kurang serius oleh perusahaan selaku pemangku kepentingan.²⁴ Berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat adalah berbicara mengenai manusia dengan segala kompleksitas di dalamnya, yang terdiri atas banyak komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan mempengaruhi seperti kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, kualitas lingkungan hidup dan sebagainya. Dengan demikian, menjadi penting untuk memandang isu lingkungan secara menyeluruh dengan tidak mengkotak-kotakan persoalan tersebut.

Beroperasinya perusahaan tambang di Kabupaten Tabalong yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun ternyata harapan tersebut tidak terjadi. Bagi pemerintah, kesejahteraan sering dilihat berdasarkan indikator BPS. Tetapi pengukuran kesejahteraan dengan hanya menggunakan indikator BPS dinilai belum tepat, karena realita di masyarakat pedesaan masih banyak penduduk yang hidup di bawah standar kelayakan hidup.²⁵ Fakta menunjukkan penggunaan indikator BPS salah satunya PDRB merupakan satuan yang tidak memadai untuk mengukur tingkat kesejahteraan dari waktu ke waktu. Data statistik yang digunakan gagal menangkap fenomena sosial sesungguhnya di masyarakat karena hanya menggunakan nilai rata-rata (*mean*). Pengukuran statistik dalam perhitungan PDRB juga gagal menangkap beberapa fenomena strategi yang sebenarnya lebih efisien dalam meningkatkan kesejahteraan warga.²⁶ Kualitas hidup yang baik merupakan konsep yang tidak hanya melihat dari sisi produksi ekonomi dan standar hidup saja, konsep ini meliputi semua faktor yang memengaruhi apa yang kita hargai dalam hidup ini, tidak terbatas pada sisi materialnya.

Pada uraian kesejahteraan ekonomi berdasarkan indikator BPS menunjukkan bahwa kegiatan dari sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Tabalong. Namun kontribusi yang besar tersebut tidak menjadi jaminan bahwa masyarakat juga merasakan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong yang masih tinggi.

Tabel 3. Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, dan Indeks FGT di Kabupaten Tabalong, 2011–2018

Tahun/ <i>Year</i>	Garis Kemiskinan <i>Poverty Line</i> (rupiah)	Penduduk Miskin/ <i>Number of Poor People</i>		P1	P2
		Jumlah/ <i>Total</i>	Persentase (Po)/ <i>Percentage</i>		
2011	278 514	13 924	6,22	0,71	0,16
2012	308 777	13 200	5,84	1,01	0,27

²⁴ Temy Setiawan and Yvonne Augustine, “Etika Lingkungan dan Kinerja Ekonomi pada Ukuran Global Reporting Initiative-G4,” *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (October 1, 2016), <https://doi.org/10.25170/jrak.v10i1.559>.

²⁵ Amirus Sodik, Konsep Kesejahteraan dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah, EQUILIBRIUM*, Vol. 3, NO. 2, Desember 2015, h. 382.

²⁶ Hana Nika Rustia, “Mengukur Kesejahteraan,” *Jurnal Aspirasi* 2, no. 2 (December 30, 2011): 225–232, <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v2i2.444>.

2013	330 764	14 300	6,15	0,61	0,09
2014	350 737	14 710	6,21	0,65	0,12
2015	368 924	15 710	6,59	0,79	0,13
2016	406 669	15 400	6,35	0,92	0,24
2017	430 129	15 000	6,09	0,95	0,23
2018	446 765	14 874	5,95	1,17	0,34

Tercatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 sebanyak 14.847 jiwa atau 5,95%. Pada periode 2014-2018 tingkat kemiskinan di Kabupaten Tabalong berfluktuatif. Pada tahun 2013-2015 jumlah penduduk miskin cenderung meningkat, yakni dari 14.300 menjadi 15.710 jiwa. Sedangkan pada tahun 2015-2018 jumlah penduduk miskin menurun hingga mencapai 14.874 jiwa pada tahun 2018. Persentase penduduk miskin pada tahun 2018 mengalami penurunan setelah pada tahun 2014-2015 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2014-2015 jumlah penduduk miskin terus meningkat dikarenakan tingkat inflasi yang meningkat dari tahun ke tahun. Akibatnya, penduduk yang tadinya memiliki penghasilan cukup, pada tahun 2014-2015 nilai penghasilannya menjadi menurun, sehingga mereka dikategorikan menjadi penduduk miskin. Namun, pada tahun 2015-2018, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 5,95 persen. Hal ini merupakan sinyal yang positif bagi Kabupaten Tabalong.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, persoalan mengenai kemiskinan di suatu daerah juga harus melihat gambaran kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2). Ukuran mengenai kedalaman kemiskinan ini dikenal dengan sebutan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*). Berdasarkan tabel di atas indeks ini bisa dilihat pada kolom indeks P1. Semakin tinggi nilai indeks, berarti semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Tabalong dalam rentang waktu 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari angka 0,65 pada tahun 2014 mencapai 1,17 di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2014-2017 semakin menjauh terhadap garis kemiskinan atau semakin menjauh dari standar kebutuhan minimum kehidupan layak yang sudah ditentukan.

Adapun Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) di periode 2014-2018 juga cenderung mengalami peningkatan. Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) merupakan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Apabila nilai indeks tinggi berarti tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2014-2016, Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari angka 0,12 pada tahun 2014 hingga mencapai 0,24 di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin pada tahun 2014-2016 cenderung semakin tinggi. Setelah itu, terjadi sedikit penurunan angka P2 hingga menjadi 0,23 pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa adanya penurunan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin pada tahun 2016-2017. Kemudian terjadi peningkatan indeks keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,34 persen. Ini berarti ada peningkatan keparahan kemiskinan di tahun 2018 karena nilai ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin menunjukkan angka yang semakin tinggi dibandingkan tahun 2017.

Pembangunan di bidang ekonomi harus berkualitas agar dapat memberikan efek yang positif bagi pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang dikejar agar sejalan dengan upaya dalam mengurangi angka kemiskinan sekaligus mengurangi kesenjangan dimasyarakat. Paradigma pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong tidak sepenuhnya berimbang positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan tersebut, antara lain karena pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, terutama dari kalangan pemodal besar serta para elit yang dekat dengan akses sumber daya. Padahal dalam Islam, kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan yang mana manfaatnya bisa dirasakan secara menyeluruh. Kesenjangan ekonomi dimasyarakat menunjukkan bahwa teori tetesan ke bawah (*trickle down effect*) yang diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan kesejahteraan tidak terjadi di Kabupaten Tabalong.

6.3. Implikasi Etika Lingkungan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi adalah salah satu unsur universal kebudayaan. Ketika terjadi perubahan aktivitas perekonomian, tentu akan berpengaruh terhadap masyarakat, baik pengaruhnya besar maupun kecil seperti hadirnya eksploitasi tambang. Hadirnya pertambangan di Kabupaten Tabalong tidak hanya merubah pola masyarakat akan tetapi juga merubah keadaan alam. Beragam kultur masyarakat di Kabupaten Tabalong berimbang pada pola etika masyarakat terhadap lingkungan.

Berdasarkan teori etika lingkungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat terhadap lingkungan dikategorikan sebagai masyarakat dengan cara pandang antroposentrime, yaitu cara pandang yang menganggap manusia sebagai fokus utama dari sistem alam semesta. Segala sesuatu di alam semesta ini bernilai apabila benda atau hal tersebut mampu memberi manfaat dan keuntungan bagi manusia secara materi.

Cara pandang antroposentrime tidak hanya dilakukan oleh pelaku pertambangan saja, akan tetapi juga pada masyarakat yang berada di sekitar lokasi penambangan. Berdasarkan hasil wawancara, penulis memperoleh informasi bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong pernah menerima kasus yang diajukan oleh masyarakat. Masyarakat melakukan pengaduan akibat aktivitas tambang yang mencemari lingkungan, tindak lanjut dari pengaduan ini kemudian di tanggapinya pihak Dinas terkait, kemudian di mediasi dan hasil akhirnya ditemukan solusi penyelesaian terhadap kasus mereka dengan jalan: pihak pertambangan melakukan ganti rugi dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Masyarakat tidak dapat menghentikan aktivitas pertambangan tersebut ketika terjadi pelanggaran. Kepedulian masyarakat akan lingkungan dengan mudah luntur karena perilaku oportunistik.²⁷ Hal inilah yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Tabalong. Ketika alam dapat memberikan keuntungan secara materi maka keberlangsungan akan kelestarian alam tersebut sekalipun diindahkan oleh masyarakat.

Dalam konsep Islam, upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat diarahkan agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kaidah dalam ajaran Islam. Kegiatan

²⁷ Annisa Mahfuzah, "Effectiveness of MUI Fatwa Number 22 Year 2011 on Environmentally Friendly Mining in South Kalimantan (Case Study in Tabalong District)" (masters, Pascasarjana, 2018), <https://idr.uin-antasari.ac.id/10073/>.

ekonomi tidak hanya mengarah pada kebutuhan perorangan saja, akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Tabalong sebagian besar dilakukan dengan sistem tambang terbuka. Sistem tambang terbuka ini selain memberikan dampak positif dalam kemudahan operasional, ternyata juga memberikan dampak negatif yaitu terjadinya pencemaran yang lebih besar terhadap lingkungan jika dibandingkan dengan sistem tambang tertutup.²⁸ Kegiatan tambang terbuka telah mengubah kualitas lahan, dimana perubahan terjadi pada landscape alam, struktur tanah, air dan udara di Kabupaten Tabalong.²⁹

Meskipun data kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator BPS menunjukkan peningkatan akan tetapi mekanisme tetesan ke bawah (*trickle down effect*) tidak terjadi di Kabupaten Tabalong sehingga cara pandang masyarakat yang antroposentrisme terhadap lingkungan tidak dapat menjamin peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini terbukti dari kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat, kesenjangan ini menunjukkan bahwa tujuan kegiatan perekonomian untuk ke-*mashlahat*-an tidak tercapai, serta harapan akan proyeksi kontribusi jangka panjang, yaitu *trickle-down effect* (tetesan ke bawah) dan *multiplier-effect* (efek berganda) terhadap perekonomian juga tidak terjadi. Ini dikarenakan manfaat tersebut tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan, antara lain karena pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat (kelompok elit). Sehingga implikasi etika lingkungan di Kabupaten Tabalong memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena kesejahteraan itu hanya berpusat pada orang tertentu saja dan makna kesejahteraan itu sendiri pun sifatnya subjektif hanya berpegang pada konsep kesejahteraan ekonomi yang cenderung konvensional.

Kesejahteraan yang diharapkan bukanlah kesejahteraan yang didapat oleh orang tertentu saja, akan tetapi kesejahteraan yang menyeluruh. Ini berarti teori *trickle down effect* tidak berjalan sebagaimana mestinya, realita di Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa yang terjadi justru *trickle up effect*. Akibatnya yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin dan semakin memperlebar kesenjangan.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi etika lingkungan di Kabupaten Tabalong memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penyebabnya adalah kecenderungan masyarakat yang mempunyai cara pandang antroposentrisme terhadap lingkungan. Cara pandang antroposentrisme memperlebar kesenjangan ekonomi di masyarakat Kabupaten Tabalong. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tujuan kegiatan perekonomian untuk ke-*mashlahat*-an tidak tercapai, serta harapan akan proyeksi kontribusi

²⁸ Yustina Hong Lawing, "Kajian Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Dalam Upaya Reklamasi Berdasarkan Kaidah Good Mining Practice Pada PT. Anugraha Bara Kaltim Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Geologi Pertambangan (JGP)* 2, no. 18 (2015).

²⁹ Tiyas Nurcahyani, "Kajian Pemanfaatan Lubang Bekas Tambang (Void) Di PT. Adaro Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan = Study of Utilization of Ex-Mine Hole (Void) at PT. Adaro Indonesia, South Kalimantan Province."

jangka panjang, yaitu *trickle-down effect* (tetesan ke bawah) dan *multiplier-effect* (efek berganda) terhadap perekonomian juga tidak terjadi. Kesejahteraan ekonomi masyarakat bisa dicapai ketika kesejahteraan itu bisa dirasakan secara menyeluruh. Salah satunya dengan memperhatikan konsep etika lingkungan sebagai instrumen penting dalam kegiatan pertambangan.

5.2. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran akan pentingnya konsep etika lingkungan dalam kegiatan pertambangan dalam upaya memaksimalkan kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Kemudian peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan kajian penelitian ini dengan menggunakan indikator dan sampel yang lebih luas dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Daftar Pustaka

- Abrar, Abrar. "Islam dan Lingkungan." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1, no. 1 (April 10, 2015). <https://doi.org/10.22202/mamangan.89>.
- Almizan, Almizan. "Distribusi Pendapatan : Kesejahteraan menurut Konsep Ekonomi Islam." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 1 (June 1, 2016): 63–82. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v1i1.16>.
- Ariwidodo, Eko. "Relevansi Pengetahuan Masyarakat Tentang Lingkungan Dan Etika Lingkungan Dengan Partisipasinya Dalam Pelestarian Lingkungan." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 11, no. 1 (2014): 1–20.
- "Arti Kata Sejahtera - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed December 8, 2019. <https://kbbi.web.id/sejahtera>.
- "Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong." Accessed December 9, 2019. <https://tabalongkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/826/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-tabalong-2002-2018.html>.
- "Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha." Accessed December 21, 2019. <https://tabalongkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/821/distribusi-pdrb-kabupaten-tabalong-menurut-lapangan-usaha-2014-2018.html>.
- "Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong." Accessed December 12, 2019. <https://tabalongkab.bps.go.id/>.
- Badrudin, Rudy. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN, 2012.
- Bourdeau, Ph. "The Man–nature Relationship and Environmental Ethics." *Journal of Environmental Radioactivity* 72, no. 1–2 (January 2004): 9–15. [https://doi.org/10.1016/S0265-931X\(03\)00180-2](https://doi.org/10.1016/S0265-931X(03)00180-2).
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung, Indonesia: PT Refika Aditama, 2012.
- Harahap, Rabiah Z. "Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup." *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 01 (2015).
- Kaelany HD. *Islam, Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Keraf, A. Sonny. *Etika lingkungan hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

- Lawing, Yustina Hong. “Kajian Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Dalam Upaya Reklamasi Berdasarkan Kaidah Good Mining Practice Pada PT. Anugrah Bara Kaltim Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur.” *Jurnal Geologi Pertambangan (JGP)* 2, no. 18 (2015).
- Mahfuzah, Annisa. “Effectiveness of MUI Fatwa Number 22 Year 2011 on Environmentally Friendly Mining in South Kalimantan (Case Study in Tabalong District).” Masters, Pascasarjana, 2018. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10073/>.
- Mubarok, Sofi. “Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan.” *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 3, no. 1 (March 5, 2018): 129–46. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v3i1.1872>.
- “PDRB Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong.” Accessed December 9, 2019. <https://tabalongkab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/821/distribusi-pdrb-kabupaten-tabalong-menurut-lapangan-usaha-2014-2018.html>.
- Purwana, Agung Eko. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014): 21–42.
- Rohman, Abdur. *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya’ Ulum AlDin*. Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Rustia, Hana Nika. “Mengukur Kesejahteraan.” *Jurnal Aspirasi* 2, no. 2 (December 30, 2011): 225–232. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v2i2.444>.
- Sari, Meri Enita Puspita, and Diah Ayu Pratiwi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam.” *Jurnal Trias Politika* 2, no. 2 (2018).
- Setiawan, Temy, and Yvonne Augustine. “Etika Lingkungan Dan Kinerja Ekonomi Pada Ukuran Global Reporting Initiative-G4.” *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (October 1, 2016). <https://doi.org/10.25170/jrak.v10i1.559>.
- Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.” *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 380–405.
- Sukarni, Sukarni. “Isu Lingkungan dalam Perspektif Kalam, Fiqh, dan Tasawuf.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (March 4, 2013): 445–67. <https://doi.org/10.15642/islamica.2013.7.2.445-467>.
- . “Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015): 433–72. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i2.731>.
- Tiyas Nurcahyani, author. “Kajian Pemanfaatan Lubang Bekas Tambang (Void) Di PT. Adaro Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan = Study of Utilization of Ex-Mine Hole (Void) at PT. Adaro Indonesia, South Kalimantan Province.” Universitas Indonesia Library, 2011. <http://lib.ui.ac.id>.
- Universitas Islam Indonesia (UII), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), and Bank Indonesia (BI) (Jakarta). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers (Rajagrafindo Persada), 2008.